

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Almilia, Dewi dan Hartono (2011), saat ini kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Dengan perubahan masyarakat yang semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial, memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*). Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Daniri (2008a).

Walaupun banyak pendapat mengemukakan tentang pentingnya melakukan CSR, tetapi sampai saat ini masih terjadi kasus pencemaran lingkungan. Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada akhir tahun 2012 diperkirakan 70% kerusakan lingkungan Indonesia dikarenakan operasi pertambangan¹. Selain itu, PT. Aneka Tambang Tbk dituding melakukan pencemaran sungai serta tidak melakukan reklamasi terhadap bekas lokasi penambangannya² dan PT. Bumi Resources masuk kedalam 8 daftar perusahaan yang memiliki catatan buruk karena telah melanggar hak asasi manusia, polusi, merusak budaya dan menghancurkan kehidupan masyarakat³.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, maka penting bagi perusahaan untuk mengungkapkan atau menginformasikan kegiatan-kegiatan CSR yang sudah dilakukan perusahaan. Agar tidak terjadi penilaian negatif dari pihak-pihak lain diluar perusahaan, seperti : pelanggan, masyarakat lokal, pemerintah, masyarakat umum dan investor atau calon investor. Menurut Sembiring (2005), Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Guthrie dan Mathews (1985) dalam

¹ Yuan. Perusahaan Tambang Diminta Terapkan CSR Lingkungan. 20 November 2012. www.neraca.co.id

² Luk. PT. Antam ,Tbk Harus Bertanggungjawab Atas Pencemaran Sungai Cikaniki. 21 Februari 2013. sentanaonline.com

³ Bagus, Wisnu. Langgar HAM, BUMI Miliki Catatan Buruk di Bursa London. 9 Oktober 2012. www.Investor.co.id

Sudana (2011), salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik, memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya, Anggraini (2006). Media yang tepat bagi perusahaan untuk meinformasikan mengenai implementasi CSR adalah lewat laporan tahunan (*annual report*) atau melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Banyak perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan aktivitas CSR dilapangan, akan tetapi belum banyak yang mengungkapkan aktivitas tersebut dalam sebuah laporan. Hanya beberapa perusahaan yang telah mengungkapkan informasi lingkungan dan tanggung jawab sosial didalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa diantaranya membuat laporan CSR tersendiri, terpisah dari laporan tahunan. Dibandingkan dengan negara lain, harus diakui bahwa perkembangan praktik laporan keberlanjutan di Indonesia berjalan lambat⁴. Hal ini didukung dengan laporan kegiatan *Indonesian Sustainability Reporting Award* (ISRA) tahun 2012, baru ada 40 perusahaan publik di Indonesia yang mengungkapkan laporan keberlanjutan. Walaupun masih tergolong rendah, hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bandingkan pada tahun 2005, hanya terdapat satu perusahaan yang mengungkapkam laporan keberlanjutan. Padahal pengungkapan CSR merupakan pengungkapan yang tak kalah penting dengan pengungkapan kinerja keuangan. Salah satu keuntungan

⁴ Darwin, Ali. Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan Indonesia. Majalah Akuntan Indonesia, Edisi 12/Tahun II/Oktober 2008.

mengungkapkan CSR adalah pihak diluar perusahaan bisa mengetahui sudah sejauh mana perusahaan peduli dengan lingkungan sosialnya. Tidak hanya itu, nilai perusahaan dimata investor juga bisa meningkat. Karena saat ini, investor juga ingin melihat sisi lain perusahaan, selain dari sisi keuangannya saja. Hal ini ditandai dengan bermunculannya indeks-indeks pasar modal yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan dan mengungkapkan CSR. Sebagai contoh *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)*, *London Stock Exchange* yang memiliki *Socially Responsible Investment (SRI) Index* dan *Financial Times Stock Exchange (FTSE)* yang memiliki *FTSE4Good*. Dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki Indeks SRI Kehati yang diluncurkan pada tahun 2009.

Tidak hanya dari sisi pasar modal, pemerintah sebagai pihak yang berwenang telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 66 ayat 2 butir C, disebutkan bahwa laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus diikutsertakan dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga saat ini, pengungkapan CSR tidak lagi dianggap pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*) tetapi sudah bersifat wajib (*mandatory*). Selain itu, Secara implisit Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2009) paragraf 12 menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai berikut :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*),

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Walaupun sudah ada peraturan yang menyarankan dan mewajibkan tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi sampai saat ini, belum ada panduan atau pedoman khusus di Indonesia mengenai informasi apa saja yang harus diungkapkan perusahaan dalam laporan tanggung jawab sosialnya. Sehingga terdapat beberapa perusahaan yang hanya sekedar saja dalam mengungkapkannya, asal memenuhi kewajiban dari peraturan saja. Tetapi memang ada perusahaan-perusahaan yang fokus dan memang berkomitmen kuat dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, mereka mengikuti panduan dari *Global Reporting Initiative* (GRI) atau ISO 26000.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal-hal apa saja yang menjadi faktor perusahaan untuk mengungkapkan CSR. Di Indonesia, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR di perusahaan telah dilakukan, diantaranya oleh : Nurkhin (2009), Apriweni (2009), Utami dan Parastiti (2009), Febrina dan Suaryana (2011), Yeterina (2011), Aulia dan Kartawjiaya (2011), Lucyanda dan Prilia (2012), Virgiawan dan Raharja (2012). Faktor-faktor yang diteliti diantaranya terdiri dari : profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, ukuran komite audit, tipe industri, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial serta kinerja lingkungan. Tetapi, masih terdapat beberapa faktor yang masih tidak konsisten terhadap

pengungkapan CSR, diantaranya yaitu faktor kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan umur perusahaan. Sehingga dijadikan variabel dalam penelitian ini.

Perusahaan *go public* dan telah terdaftar di BEI adalah perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan publik. Yang artinya bahwa semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham, menurut Nur (2012). Selain dari informasi keuangan, informasi yang diinginkan publik adalah tentang pengungkapan CSR. Selain itu, perusahaan yang memiliki kepemilikan publik lebih besar, dianggap memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan publik lebih kecil. Peneliti sebelumnya yang mencoba melihat pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan CSR adalah Badjuri (2011) dan Nur (2012). Ditemukan tidak ada pengaruh antara kepemilikan publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian Puspitasari dalam Nur (2012), menemukan pengaruh yang berlawanan.

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, FCGI 2002, (dalam Badjuri, 2011). Salah satu cara bagi manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham adalah dengan melakukan

pengungkapan CSR. Penelitian mengenai ukuran dewan komisaris, pada penelitian Rahmawati dan Utami (2010), Nurkhin (2009) berhasil membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan pada penelitian Badjuri (2011), Nur (2012) tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

Bila perusahaan ingin tetap hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang, maka perusahaan harus memperoleh laba atau profit. Dalam penelitian Febrina & Agung (2011) tingkat profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, artinya semakin tinggi profitabilitas maka tidak akan memperluas kebijakan pengungkapan CSR, karena ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal – hal yang dapat mengganggu informasi tentang kesuksesan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009), Utami dan Parastiti (2011), Lucyanda dan Prililia (2012), Virgiawan dan Raharja (2012) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Apriweni (2009), Febrina dan Suaryana (2011), Nur (2012), Kamil dan Herusetya (2012) memiliki hasil yang berbeda, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Umur perusahaan diperkirakan memiliki pengaruh dengan pengungkapan CSR. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori legitimasi.

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Semakin lama perusahaan maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut, Utami dan Prastiti (2011). Hasil penelitian yang membuktikan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dilakukan oleh Soliman dan Sakr (2012). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Parastiti (2011), Lucyanda dan Prilia (2012) memiliki hasil yang berlawanan, umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul :

“Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan publik dengan pengungkapan CSR?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR?
3. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR?

4. Apakah terdapat pengaruh antara umur perusahaan dengan pengungkapan CSR?
5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan umur perusahaan dengan pengungkapan CSR?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.
3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.
4. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
5. Untuk menguji pengaruh secara simultan antara kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi, diantaranya yaitu :

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi terutama berkaitan dengan kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan

umur perusahaan serta pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan keputusan sehubungan dengan penerapan CSR dalam perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan kajian dan pengujian terhadap konsep CSR dan pengungkapannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.